

Pemetaan Potensi Ekonomi di Pulau Jawa Berdasarkan Pendekatan LQ, DLQ, dan Analisis *Input-Output*

Khoirotun Ni'mah¹, Nurjannah Rahayu Kistanti²

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
khoirotun015@students.unnes.ac.id¹, nurjannah.rk@mail.unnes.ac.id²

ABSTRACT

Java contributes 57.04% of the national GDP, making it the primary engine of Indonesia's economic growth. However, the six provinces receive this contribution unevenly, with pronounced disparities between northern and southern Java. Through Presidential Regulation No. 72 of 2023, the government has designated Main Activity Centers (PKU) and Supporting Activity Centers (PKP) on the island to promote more balanced economic development. However, the economic roles assigned to each PKU remain broad, and no recent study has mapped Java's leading sectors to inform more targeted, potential-driven planning. Therefore, this research applies Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Input-Output Table Analysis—Backward Linkage (IBL) and Forward Linkage (IFL)—to identify each province's core sectors and their linkages. The results show that according to LQ and DLQ, Java's leading sectors are wholesale and retail trade, construction, manufacturing, and education services; meanwhile, IBL and IFL analyses reveal that electricity and gas procurement, along with wholesale and retail trade, dominate in almost all provinces. These findings are expected to provide an initial framework for economic development planning aligned with each province's economic structure, ensuring policies are optimally implemented.

Keywords: *Leading Sectors, LQ, DLQ, IBL, IFL*

ABSTRAK

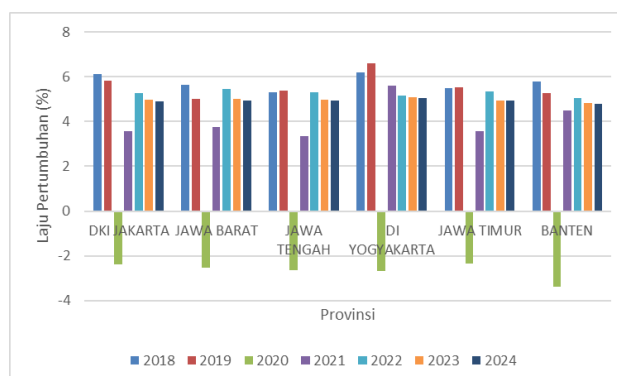
Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 57,04% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun menjadi poros utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi besarnya pada PDB Indonesia, namun kontribusi tersebut tidak terdistribusi secara merata di antara ke enam provinsi. Ketimpangan antar wilayah masih terjadi di Pulau Jawa, khususnya antara Jawa bagian utara dan selatan. Pemerintah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2023 menetapkan Pusat Kegiatan Utama (PKU) dan Pusat Kegiatan Pendukung (PKP) di Pulau Jawa sebagai upaya peningkatan perekonomian nasional secara merata. Namun fungsi ekonomi setiap PKU yang ditetapkan oleh pemerintah masih bersifat *general* dan belum ada penelitian terbaru yang memetakan sektor-sektor unggulan di Pulau Jawa untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih spesifik dan berbasis potensi wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan Analisis Tabel *Input-Output* melalui perhitungan Indeks Daya Penyebaran (IBL) dan Indeks Derajat Kepekaan (IFL) untuk mengetahui sektor unggulan yang menjadi basis ekonomi di setiap provinsi dan yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lainnya. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor unggulan di Pulau Jawa didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, industri pengolahan, dan jasa pendidikan. Sedangkan berdasarkan analisis IBL dan IFL, sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor perdagangan besar dan

eceran mendominasi hampir di seluruh provinsi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan gambaran awal yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik struktur ekonomi setiap provinsi sehingga kebijakan yang ditetapkan akan terealisasi secara optimal.

Kata Kunci: Sektor Unggulan, LQ, DLQ, IBL, IFL

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan dalam menilai kinerja pembangunan suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indonesia menunjukkan tren penurunan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,03%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Pulau Jawa sebagai pulau terpadat yang dihuni oleh lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia, menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Berdasarkan informasi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, PDB Indonesia yang mencapai Rp22.139 triliun, sebesar 57,04% nya disumbang oleh Pulau Jawa dengan pertumbuhan sebesar 4.92% YoY. Di mana, Provinsi DKI Jakarta memberikan kontribusi paling besar bagi pertumbuhan Pulau Jawa dengan nilai PDRB tumbuh 4.9% mencapai Rp2.154 triliun, Provinsi Jawa Timur menjadi kontributor terbesar kedua nilai PDRB-nya tumbuh 4.93% mencapai Rp1.936 triliun (BPS, 2025a). Kemudian Jawa Barat nilai PDRB-nya tumbuh sebesar 4.95% mencapai RP1.752 triliun, Jawa Tengah PDRB-nya tumbuh 4.95% mencapai Rp1.157 triliun, Banten mengalami pertumbuhan sebesar 4,79% dengan nilai Rp531 triliun, dan Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh 5,03% sebesar Rp125 triliun (BPS, 2025). Dalam hal ini, provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional dengan jumlah populasi yang besar dan berbagai sektor perekonomian yang berkembang.

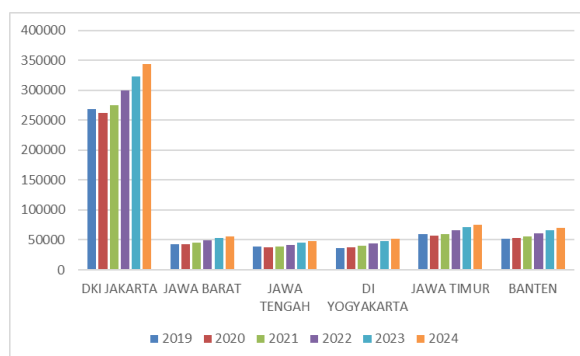


Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Jawa

Sumber: BPS, Mei 2025

Meskipun Pulau Jawa menjadi poros utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi besarnya pada PDB Indonesia, namun kontribusi tersebut tidak terdistribusi secara merata di antara ke enam provinsi. Ketimpangan antar wilayah masih terjadi di Pulau Jawa, khususnya antara Jawa bagian utara dan selatan. Pada utara Jawa, di dalamnya termasuk Jakarta dan Surabaya, berkembang menjadi wilayah metropolis atau kota besar dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan infrastruktur yang mumpuni. Sedangkan Pulau Jawa bagian selatan, Seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Blitar, masih mengalami stagnasi dan keterbatasan pada layanan publik (Wardana & Muta'ali, 2025). Ketimpangan yang terjadi antar wilayah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang timpang dan dapat memantik konflik horizontal (Fikri & Fafurida, 2018).

Apabila ditinjau berdasarkan nilai PDRB per kapita yang dihasilkan, disparitas antar provinsi di Pulau Jawa terlihat dengan besarnya kesenjangan yang tercermin dari perbedaan tingkat pencapaian ekonomi masing-masing provinsi. Di mana, provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional, pada tahun 2024 memiliki nilai PDRB per kapita mencapai Rp344,35 juta dan menjadi yang paling tinggi di Pulau Jawa, sedangkan provinsi DIY hanya sebesar Rp 51,47 dan menjadi yang paling rendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan pada tingkat produktivitas dan kapasitas ekonomi antar wilayah di Pulau Jawa, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Maka diperlukan kebijakan pembangunan yang tepat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.



Gambar 2. PDRB Per Kapita Provinsi di Pulau Jawa

Sumber: BPS, 2025c

Dalam upaya mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pemerintah berupaya menyusun strategi pembangunan yang mendorong pemaksimalan potensi sektor unggulan dari masing-masing wilayah guna meningkatkan basis ekonomi wilayah. Strategi yang dibuat dengan menetapkan pusat-pusat ekonomi bertujuan agar pertumbuhan tidak hanya berpusat pada satu wilayah juga keterhubungan antar wilayah akan meningkat. Dengan kata lain, pembangunan difokuskan pada

pengoptimalan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga masing-masing wilayah dapat memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, pemerintah membentuk Pusat Kegiatan Utama (PKU) yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah, dan menetapkan Pusat Kegiatan Pendukung (PKP) yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan berfungsi sebagai pendukung pusat pengembangan wilayah. Terdapat beberapa tujuan disertai strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penataan ruang melalui pembentukan PKU dan PKP yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian nasional, diantaranya adalah, pertama mewujudkan lumbung pangan utama nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan. Kedua, mewujudkan pusat ekonomi nasional yang berbasis industri serta perdagangan dan jasa melalui pengembangan dan pemantapan sistem pusat ekonomi nasional di Pulau Jawa-Bali, dan pengembangan kawasan perkotaan, yang telah ditetapkan dalam PKU dan PKP, sebagai pusat industri serta pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional.

Meskipun kebijakan yang ditetapkan tersebut dirancang untuk memperkuat perekonomian daerah melalui penetapan pusat kegiatan ekonomi, dalam implementasinya belum didukung dengan pemetaan yang komprehensif pada sektor-sektor utama di setiap wilayah strategis provinsi. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan pemerintah di tingkat makro dengan kinerja ekonomi sektor tersebut, sehingga beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan belum menunjukkan adanya capaian kinerja ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi, sehingga perumusan kebijakan dapat diarahkan dan difokuskan pada sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

Menurut Dewi (2014), berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ), sektor yang menjadi basis (sektor unggulan) di Pulau Jawa dari tahun 2008-2012 adalah sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sejalan dengan hasil LQ, berdasar analisis Tipologi Klassen per sektor, secara umum sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang masuk dalam kategori sektor kuadran I dan II. Penelitian dengan analisis *Location Quotient* (LQ) juga dilakukan oleh Octaviany (2018) pada wilayah Pantai Utara Pulau Jawa tahun 2013-2016, hasilnya menunjukkan bahwa wilayah Pantura memiliki sektor unggulan yang paling banyak pada sektor Pendidikan, kemudian sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan juga Jasa Lainnya. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sektor dominan

yang dapat memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang baik bagi daerah.

Selain menentukan sektor yang menjadi basis atau unggulan, perlu diketahui juga keterkaitan antar sektornya guna memahami pola interdependensi ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah, sehingga akan diketahui apakah sektor yang diunggulkan akan memberikan pengaruh dan mampu mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Maka perumusan strategi dan kebijakan pembangunan berbasis sektoral akan lebih efektif dengan berfokus pada pengoptimalan sektor yang berperan sebagai penggerak atau *key sector* sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara menyeluruh atau merata. Namun belum ada penelitian terbaru yang menganalisis sektor unggulan beserta keterkaitan antar sektor di Pulau Jawa. Untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor unggulan di Pulau Jawa, penelitian ini menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ) dan Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) berdasarkan Tabel *Input-Output*. Selanjutnya, pendekatan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) juga digunakan guna melihat perubahan daya saing sektor secara dinamis dalam periode waktu yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor yang menjadi unggulan pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2024. Hasil penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan dan perbaikan kebijakan berbasis sektoral bagi pemerintah, sehingga penyusunan strategi dapat berfokus pada optimalisasi potensi yang ada di setiap Provinsi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

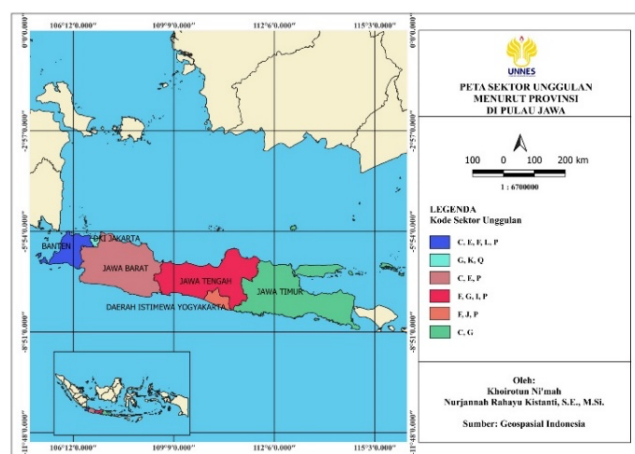
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut Lapangan Usaha 2024 dan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha 2029-2024 dari Provinsi di Pulau Jawa, Selain itu juga menggunakan data Tabel *Input-Output* 2016 dari masing-masing provinsi, di mana keseluruhan data tersebut bersumber dari data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) dan Indeks Daya Penyebaran (IDP) berdasarkan Tabel *Input Output* 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis LQ dan DLQ

Berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ yang ditunjukkan pada Lampiran 4., dari seluruh sektor yang menjadi unggulan di masing-masing provinsi, sektor P mendominasi sebagai sektor unggulan di 4 provinsi di Pulau Jawa, disusul sektor C, G,

dan F yang menjadi unggulan di 3 provinsi. Sebagai sektor unggulan, artinya produk yang dihasilkan oleh sektor tersebut tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi memiliki potensi untuk diekspor ke daerah lainnya. Selain itu, sektor unggulan masing-masing provinsi tersebut mengalami pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan sektor sejenis di Indonesia, yang menandakan adanya kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Untuk memahami pola dominasi sektor unggulan dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah, penting untuk melihat sebaran spasial dari sektor-sektor tersebut pada setiap provinsi. Pada gambar 2. disajikan peta sebaran sektor unggulan dari setiap provinsi di Pulau Jawa berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ.



Gambar 3. Peta Persebaran Sektor Unggulan pada Provinsi di Pulau Jawa Berdasarkan Analisis LQ dan DLQ
Sumber: data olah, 2025

Berdasarkan analisis LQ dan DLQ yang tertera pada lampiran 4. diketahui bahwa Provinsi di Pulau Jawa memiliki sektor unggulan yang beragam. Provinsi Banten memiliki 5 sektor yang menjadi unggulan, yaitu sektor C (Industri Pengolahan), E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang), F (Konstruksi), L (Real Estate), dan P (Jasa Pendidikan). Sektor Industri pengolahan menjadi penggerak bagi perekonomian provinsi Banten, hal ini karena di Provinsi Banten banyak beroperasi industri besar. Berdasarkan data BPS tahun 2023, terdapat 3.794 perusahaan besar dan sedang yang masih aktif dan berdiri tersebar di 8 kabupaten/kota di Banten. Banyaknya industri yang tumbuh di provinsi Banten didukung dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah baik di provinsi Banten maupun di daerah lainnya (Sumarna & Hidayatullah, 2023) (Sutanti, 2020). Sektor E menjadi sektor basis karena memiliki peran penting dalam mendukung infrastruktur dasar dan keberlanjutan lingkungan bagi provinsi Banten sebagai wilayah dengan aktivitas industri yang tinggi (Arum & Aminda, 2023). Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, bahwa pada tahun 2020 pemerintah setempat telah menetapkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas air dan udara

serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui beberapa cara, salah satunya adalah peningkatan jaminan mutu laboratorium lingkungan dan pengujian dan analisis laboratorium lingkungan. Sektor Konstruksi juga menjadi basis ekonomi karena terdapat proyek-proyek pembangunan besar yang terjadi di provinsi Banten, seperti proyek pembangunan tol (Tol Serang-Panimbang dan Tol Serpong-Balaraja), perluasan Bandara Soekarno Hatta, bahkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung yang menjadi proyek strategis nasional.

Selanjutnya, Sektor Real Estate mendorong perekonomian provinsi Banten melalui peningkatan investasi di bidang perumahan seperti pada proyek kawasan komersial yang dibangun di kawasan PIK 2, Alam Sutera, BSD, Serpong, dan Maja. Melalui pengembangan kota-kota mandiri tersebut, diharapkan akan membuka area-area pertumbuhan ekonomi baru sehingga kinerja sektor *real estate* akan semakin berpotensi. Kemudian sektor pendidikan di provinsi Banten yang menjadi salah satu sektor unggulan, menunjukkan perkembangan yang tercermin melalui kinerja indikator-indikator kunci. Berdasarkan data BPS (2024b), Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia tuju tahun di provinsi Banten mengalami kenaikan di tahun 2024 mencapai 13,10 tahun sedikit lebih tinggi dari tahun 2023 yang mencapai 13,09 tahun, di mana kenaikan tersebut menandakan bahwa ekspektasi masa sekolah anak sejak jenjang dasar hingga menengah atas mengalami kenaikan. Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas juga mengalami peningkatan di tahun 2024 mencapai 9,23 tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 9,15 tahun, yang mengindikasikan bahwa kebijakan wajib belajar mengalami keberhasilan dan kualitas layanan pendidikan mengalami peningkatan (BPS, 2024e). Peningkatan pada kedua indikator tersebut mendorong kenaikan angka IPM Banten, di mana pada tahun 2024 mencapai 74,41 atau mengalami peningkatan sebesar 0,58 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 (BPS, 2024c). Hal tersebut menguatkan posisi sektor pendidikan sebagai salah satu dasar dalam membentuk modal manusia yang berkualitas sebagai modal bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten

Provinsi DKI Jakarta memiliki 3 sektor unggulan yang mendominasi, yaitu pertama sektor G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sektor ini menjadi basis perekonomian dengan memberikan dominasi paling besar pada PDRB DKI Jakarta 2024 sebesar 18,01 persen terhadap total ekonomi BPS (2025a). Sektor Perdagangan menjadi unggulan sebab provinsi DKI Jakarta menjadi pusat distribusi nasional dengan banyaknya perusahaan distribusi dan pusat logistik nasional yang berbasis di wilayah ini, dan sentra perdagangan dengan perputaran uang yang besar seperti kawasan Tanah Abang dan Glodok juga berlokasi di Jakarta (Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, 2018). Sektor kedua yang menjadi unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta adalah sektor K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS DKI Jakarta, nilai tambah sektor tersebut mengalami pertumbuhan signifikan, di mana pada tahun 2024 mencapai Rp233.740,30 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023

yang sebesar Rp221.857,65 miliar. Berdasarkan data BPS (2024d), provinsi DKI Jakarta menjadi pusat aktivitas perbankan dengan adanya 61 bank yang terdiri dari bank devisa dan non devisa dan didukung sekitar 4000 kantor cabang. Ketersediaan layanan keuangan tersebut memudahkan dalam penyaluran kredit, terutama kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di mana berdasarkan data OJK total kredit perbankan di DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai Rp1.200 triliun.

Secara keseluruhan, kinerja sektor keuangan di DKI Jakarta menunjukkan kekuatan struktural yang mendorong stabilitas makro dan percepatan pertumbuhan inklusif pada pusat ekonomi nasional. Sektor Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) juga menjadi salah satu sektor unggulan di DKI Jakarta, dengan nilai *output* mencapai Rp76.588,42 miliar pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS (2025b), pada tahun 2024 jumlah rumah sakit umum di DKI Jakarta mencapai 139 unit dan rumah sakit khusus sebanyak 49 unit yang tersebar di lima kota administrasi, dan didukung dengan fasilitas kesehatan lain seperti klinik, puskesmas, juga rumah sakit rujukan nasional. Keberadaan infrastruktur kesehatan yang memadai tersebut menunjukkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, serta menunjukkan bahwa sektor jasa kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Jawa Barat memiliki 3 sektor unggulan yang mendominasi dengan nilai LQ dan DLQ >1, yaitu sektor C (Industri Pengolahan), E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang), dan P (Jasa Pendidikan). Sektor Industri Pengolahan menjadi basis ekonomi di Jawa Barat dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dengan memberikan kontribusi sebesar 1,51% terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut, didukung dengan berdirinya 8.833 perusahaan industri manufaktur berskala besar dan menengah pada tahun 2023 yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat (Permana et al., 2023). Kemudian, sektor E yang menjadi unggulan di Jawa Barat, akan mendukung pencapaian layanan dasar keberlanjutan hidup di wilayah ini. Berdasarkan data BPS Jawa Barat (2024), pada tahun 2023 terdapat 24 perusahaan pengadaan air bersih yang beroperasi dengan total kapasitas produksi mencapai 78,02% dari tingkat efektivitas produksi air bersih di Jawa Barat. Di sisi pengelolaan sampah, pemerintah provinsi Jawa Barat mengalokasikan sebesar 0,4% dari APBD 2024 atau senilai Rp36,79 triliun untuk penanganan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Di mana, dari sisi kebijakan, pengelolaan sampah didukung dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya memuat salah satunya tentang pengelolaan sampah dan pengolahan limbah.

Kemudian, sektor pendidikan yang menjadi sektor unggulan di Jawa Barat memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia di provinsi ini, di mana kinerja sektor pendidikan menunjukkan adanya penguatan berdasarkan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah, yang keduanya menjadi komponen penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dari sisi pendidikan. Berdasarkan data BPS Jawa Barat (2024a), HLS Jawa Barat tahun 2024 mencapai 12,80 tahun, mengalami peningkatan jika dibanding dengan 12,68 tahun pada tahun 2023. Artinya, secara agregat besarnya nilai HLS dan RLS tersebut mencerminkan bahwa provinsi Jawa Barat telah berhasil dalam memperluas kesempatan belajar dan lama menempuh pendidikan bagi penduduknya.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 sektor unggulan yang mendominasi, yaitu sektor F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan P (Jasa Pendidikan). Berdasarkan data BPS Jawa Tengah (2025), sektor konstruksi konsisten berkontribusi pada PDRB Jawa Tengah sekitar 10%-11% dari total PDRB provinsi per tahun dan berada di urutan keempat sektor penyumbang terbesar pada PDRB Jawa Tengah. Artinya, hal tersebut menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki peran dalam mendorong aktivitas investasi dan pembangunan fisik di Jawa Tengah (Bangun & Setyono, 2020). Sehingga berdasarkan kontribusinya tersebut, perubahan yang terjadi pada sektor ini akan berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi regional. Keberadaan proyek-proyek infrastruktur besar yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dan mulai beroperasi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Bendungan Randugunting, dan Jalan Tol Lintas Semarang-Demak yang menjadi prioritas dan berfungsi sebagai akses transportasi sekaligus tanggul laut Pantai Utara Jawa, diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan melalui sektor pembangunan fisik di Jawa Tengah untuk jangnan menengah dan jangka panjang.

Selanjutnya, Sektor G atau Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor unggulan dan berada di urutan kedua sektor yang memberikan kontribusi besar pada PDRB Jawa Tengah, di mana pada tahun 2024 nilai kontribusinya mencapai 13,49% terhadap PDRB yang menandakan peran penting dalam aktivitas ekonomi regional. Berdasarkan data yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2016, sektor G berada di urutan pertama sebagai lapangan usaha dengan jumlah usaha terbanyak, yaitu mencapai 1.801.431 unit usaha atau mencapai 43,16% dari total jumlah usaha Jawa Tengah. Di mana, penyerapan tenaga kerja mencapai 2.838.148 tenaga kerja atau sebesar 30,18% dari total tenaga kerja yang terserap dalam aktivitas perekonomian di Jawa Tengah (Anisah & Hersugondo, 2018). Hal tersebut menguatkan bahwa sektor G memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Kemudian, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi salah satu pilar perekonomian di Jawa Tengah yang terus mengalami pertumbuhan dan memberikan kontribusi signifikan pada PDRB. Berdasarkan data BPS, sektor ini mengalami peningkatan *output* dari hanya 30.773,74 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2024 mencapai 46.670,27 Juta Rupiah. Dari sisi lapangan pekerjaan, sektor ini juga mengalami peningkatan terbesar mencapai 0,15 juta orang dari total 0.45 juta orang pada tahun 2023. Terakhir adalah sektor Jasa Pendidikan, yang menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya

manusia di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS, angka HLS Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 12,85 tahun meningkat jika dibanding dengan tahun 2022 sebesar 12,68 tahun. Sektor pendidikan berperan penting dalam pembangunan manusia dan mendorong dalam kenaikan nilai IPM provinsi, di mana pada tahun 2024 IPM Jawa Tengah mencapai 73,87, meningkat dibanding 2023 sebesar 73,39 dan tahun 2022 yang sebesar 72,80. Capaian sektor pendidikan yang menjadi penggerak pembangunan sumber daya manusia, menjadi modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan di Jawa Tengah.

Provinsi DI Yogyakarta memiliki 3 sektor unggulan yang mendominasi, yaitu F (Konstruksi), J (Jasa Informasi dan Komunikasi), dan P (Jasa Pendidikan). Sektor konstruksi menjadi salah satu sektor unggulan bagi DIY yang pada tahun 2024 pertumbuhannya mencapai 8,44%. Berdasarkan data BPS, dari sisi ketenagakerjaan sektor tersebut mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja tetap dari tahun 2021 sebanyak 7.040 orang, tahun 2022 7.090 orang, dan tahun 2023 mencapai 7.100 orang. Pertumbuhan sektor konstruksi di DIY didorong oleh adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol yang menghubungkan Solo-Yogya-YIA Kulon Progo sepanjang 96,57 Km dengan nilai investasi mencapai 27.486 triliun. Hal tersebut mencerminkan peran sektor konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan regional di DIY. Sektor jasa informasi dan komunikasi yang menjadi sektor unggulan di DIY, nilai kontribusinya mencapai 10,77% dari total PDRB 2023 (BPS DIY, 2025).

Sektor informasi dan komunikasi juga memberikan peran penting dalam mendorong ekonomi berbasis teknologi di DIY, di mana pemerintah setempat menerapkan program Jogja Smart City dengan memasang jaringan fiber optik pada lebih dari 100 desa dan membangun 250 titik Wi-Fi yang bisa digunakan bebas selama 24 jam oleh masyarakat, sehingga adanya program ini mendukung ekosistem ekonomi digital dan efisiensi layanan publik. Sektor jasa pendidikan DIY mengalami peningkatan dengan tercermin dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 15,70 tahun pada tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang mencapai 15,66 tahun. Sedangkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 9,83 tahun menjadi 9,92 tahun pada tahun 2024. Kenaikan kedua indikator tersebut mendorong kenaikan pada IPM DIY yaitu 81,62 pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Data-data tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa pendidikan DIY tidak hanya unggul berdasarkan nilai LQ dan DLQ, namun juga substansial dalam membentuk modal manusia yang berkualitas yang menjadi fondasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Provinsi Jawa Timur memiliki 2 sektor unggulan yang mendominasi, yaitu sektor C (Industri Pengolahan) dan G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sektor industri pengolahan menjadi pilar ekonomi dengan kontribusi mencapai 30,85% dari total PDRB Jawa Timur pada tahun 2024 (BPS Jawa Timur, 2025). Keunggulan sektor ini terhadap perekonomian Jawa Timur didukung dengan adanya kawasan industri besar seperti yang terletak di Surabaya, Pasuruan,

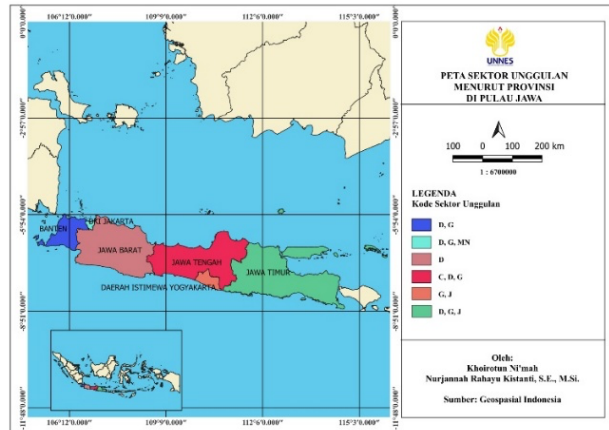
dan Gresik, yang memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan industri nasional yang memperkuat daya saing manufaktur Indonesia di pasar global. Selanjutnya, sektor G menjadi sektor unggulan di Jawa Timur dengan kontribusinya yang besar pada PDRB Jawa Timur sebesar 18,81% pada tahun 2024 dan berada di urutan kedua setelah industri pengolahan. Dari sisi ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS pada tahun 2023, sektor perdagangan menjadi sektor dengan peningkatan jumlah pekerja terbanyak, yaitu mengalami penambahan sebanyak 412,02 ribu orang. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023, sektor ini berada di urutan kedua sebagai lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Jawa Timur yaitu sebesar 19,07%. Berdasarkan tingkat pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja tersebut, menjadikan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai salah satu pilar dalam perekonomian Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2024).

Analisis IBL dan IFL

Keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang digunakan untuk mengidentifikasi sektor kunci atau sektor unggulan yang dapat difokuskan dan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi (Hazari, 1970). Sektor-sektor yang menjadi unggulan dianggap lebih mampu untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan melalui efek penyebarannya jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan rendah (Yotopoulos & Nugent, 1973). Keterkaitan antar sektor dianalisis menggunakan indeks daya penyebaran (IBL) dan indeks daya kepekaan (IFL). Sektor yang masuk kategori unggulan nilai IBL dan IFL-nya harus di atas satu, artinya sektor tersebut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu memanfaatkan *input* dan *output* secara efisien. Apabila nilai IBL suatu sektor kurang dari satu dan IFL-nya lebih dari satu artinya sektor tersebut memiliki kemampuan untuk menggerakkan sektor lain namun belum optimal dalam memanfaatkan *input*. Terdapat juga sektor yang nilai IBL-nya lebih dari satu sedangkan IFL-nya kurang dari satu, sektor seperti ini memiliki kemampuan dalam menggerakkan sektor lainnya namun belum optimal dalam memanfaatkan *output*-nya, tetapi memiliki potensi untuk dikembangkan. Terakhir adalah sektor dengan nilai IBL dan IFL yang keduanya kurang dari satu, sektor seperti ini kurang diunggulkan karena *output*-nya tidak termanfaatkan dengan baik dan kurang mampu dalam menggerakkan perekonomian.

Berdasarkan hasil analisis sektor unggulan menggunakan pendekatan IBL dan IFL yang terlampir pada lampiran 1. diketahui bahwa sektor D (Pengadaan Listrik dan Gas) dan G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) merupakan sektor dengan nilai IBL dan IFL lebih dari satu pada sebagian besar provinsi di Pulau Jawa. Artinya sektor pengadaan listrik dan perdagangan termasuk dalam kategori sektor unggulan yang dapat mendorong perekonomian mulai dari sektor itu sendiri, provinsi yang bersangkutan, Pulau Jawa, hingga taraf nasional. Beberapa provinsi yang memiliki sektor unggulan yang sama menunjukkan adanya keselarasan dalam pembangunan dengan fokus pada sektor yang sama. Pada gambar

4. disajikan peta sebaran sektor unggulan dari setiap provinsi di Pulau Jawa berdasarkan hasil analisis IBL dan IFL.



Gambar 4. Peta Persebaran Sektor Unggulan pada Provinsi di Pulau Jawa Berdasarkan Analisis IBL dan IFL
Sumber: Data olah, 2025

Berdasarkan hasil analisis yang digambarkan dalam peta tersebut, diketahui bahwa terdapat empat provinsi yang sektor unggulannya diantaranya terdiri dari sektor D dan G, dan ditambah sektor lainnya. Sementara itu, di provinsi Jawa Barat hanya memiliki sektor D sebagai sektor unggulan, dan di provinsi DIY, sektor G dan J menjadi sektor yang diunggulkan dalam mendorong aktivitas ekonomi regional.

Analisis Gabungan

Hasil perhitungan LQ dan DLQ untuk mengidentifikasi sektor unggulan pada Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan hasil yang lebih beragam jika dibandingkan dengan hasil analisis IBL dan IFL. Hal tersebut karena LQ dan DLQ berfokus pada keunggulan suatu wilayah untuk mengidentifikasi sektor unggulan lokal dan menggambarkan dinamika perkembangannya dari waktu ke waktu. Perbedaan tersebut mencerminkan keragaman karakteristik ekonomi antar provinsi, yang masing-masing memiliki struktur ekonomi dan sektor unggulan yang berbeda. Sebaliknya, pendekatan IBL dan IFL, yang lebih menekankan pada keterkaitan lintas sektoral dalam sistem ekonomi agregat, cenderung menghasilkan hasil yang lebih konsisten karena menggambarkan struktur hubungan lintas sektoral di seluruh wilayah secara lebih komprehensif dan sistematis (Anisah, 2018) (Raa, 2020) (Rasmussen, 1956).

Berdasarkan hasil analisis sektor unggulan pada setiap provinsi di Pulau Jawa menggunakan analisis LQ DLQ dan IBL IFL, hasilnya menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor unggulan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sektor jasa informasi dan komunikasi menjadi unggulan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor-sektor tersebut selain memiliki keunggulan dalam memproduksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

wilayah dan diekspor ke luar wilayah, serta dan memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat, juga memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian, baik keterkaitan ke belakang sebagai pengguna *input* yang bersumber dari sektor lain maupun keterkaitan ke depan sebagai pemasok *output* untuk digunakan oleh sektor lainnya. Sedangkan sektor jasa pendidikan dan sektor konstruksi yang menjadi unggulan dalam produksi dan memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat di beberapa provinsi, berdasarkan analisis keterkaitan, kedua sektor tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan konstruksi masih belum mampu memanfaatkan *input* dan *output*-nya secara maksimal.

Evaluasi Kebijakan

Pemerintah melalui perpres nomor 72 Tahun 2023 telah menetapkan beberapa PKU dengan beberapa fungsinya masing-masing seperti pada Tabel 2.

Tabel 1. Penetapan Kawasan Perkotaan sebagai PKU dan Fungsinya

Sumber: Perpres No. 72 Tahun 2023

Pusat Kegiatan Utama (PKU)		
Kawasan Perkotaan	Provinsi	Fungsi
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)	DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	Pusat ekonomi global, pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi.
Cikampek dan Cikopo	Jawa Barat	Pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat pertanian, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi.
Bandung Raya	Jawa Barat	Pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi.
Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi, (Kedungsepur)	Jawa Tengah	Pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pusat pertanian, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi.
Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila)	Jawa Timur	Pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi.

Berdasarkan informasi pada Tabel 1. diketahui bahwa setiap PKU telah ditetapkan oleh pemerintah dengan beberapa fungsi strategis. Di mana fungsi dari

masing-masing PKU menunjukkan pola yang relatif seragam seperti sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi. Juga tambahan fungsi sebagai pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal di beberapa PKU. Sedangkan, berdasarkan analisis LQ dan DLQ serta IBL dan IFL yang telah dilakukan, diketahui bahwa setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki keunggulannya masing-masing yang berbeda satu sama lain.

Pemerintah menetapkan kawasan PKU Jabodetabek yang merupakan gabungan dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan fungsi sebagai Pusat ekonomi global, pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi. Namun, hasil perhitungan LQ dan DLQ menunjukkan sektor yang menjadi unggulan di DKI Jakarta adalah sektor perdagangan (LQ: 1,23 dan DLQ: 1,68), sektor jasa keuangan (LQ: 2,70 dan DLQ: 1,47), dan sektor jasa kesehatan (LQ: 1,59 dan DLQ: 2,60). Dari sisi IBL dan IFL, hanya sektor perdagangan yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya dengan nilai IBL: 1 dan IFL:1. Ditambah dengan sektor pengadaan listrik dan gas (IBL: 1,85 dan IFL: 1,81) dan sektor jasa perusahaan (IBL: 1,04 dan IFL: 1,19). Sedangkan di provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ, sektor yang menjadi unggulan adalah industri pengolahan (LQ: 2,09 dan DLQ: 1,34), pengadaan air (LQ: 1,07 dan DLQ: 3,93), dan jasa pendidikan (LQ: 1,02 dan DLQ: 12,58). Dan dari sisi IBL dan IFL, hanya sektor pengadaan listrik dan gas yang memiliki keterkaitan tinggi dengan sektor lainnya (IBL:1,68 dan IFL: 1,80). Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk PKU Jabodetabek masih perlu disesuaikan dengan tetap mempertahankan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, namun pada fungsi pusat industri sebaiknya mencakup sub sektor pengadaan listrik dan air yang menunjukkan kinerjanya dalam menopang perekonomian. Kemudian fungsi sebagai pusat promosi pariwisata sebaiknya diubah untuk berfokus sebagai pusat layanan kesehatan dan pendidikan di Jabodetabek.

Kemudian untuk kawasan perkotaan PKU Cikampek dan Cikopo di Provinsi Jawa Barat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat pertanian, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi, masih diperlukan adanya penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan fokus pada jasa pendidikan, dan fungsi sebagai pusat industri dengan fokus pada industri pengolahan. Namun, untuk fungsi sebagai pusat pertanian sebaiknya diganti dengan berfokus pada sektor pengadaan air, serta listrik dan gas sebagai salah satu fungsi utama, sebab kedua sektor tersebut merupakan sektor yang menjadi unggulan pada perekonomian Jawa Barat.

Pada kawasan PKU Bandung Raya di Provinsi Jawa Barat, fungsinya adalah sebagai Pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pusat pertanian, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi. Berdasarkan hasil LQ, DLQ, IBL, dan IFL, maka fungsi tersebut masih diperlukan penyesuaian, karena fungsi sebagai pusat pertanian

kurang relevan sebab sektor tersebut tidak memiliki potensi sebagai sektor basis juga keterkaitan antar sektor yang lemah. Kemudian fungsi sebagai pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal tetap dipertahankan dengan menguatkan pada sektor jasa pendidikan sebagai salah satu sektor unggulan. Selain itu, fungsi sebagai pusat industri dan jasa, serta pusat transportasi juga dapat dipertahankan namun dengan memfokuskan pada distribusi utilitas dan jaringan logistik air, listrik, dan gas.

Kawasan Perkotaan Kedungsepur di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu PKU memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pusat pertanian, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi. Sedangkan berdasarkan hasil LQ dan DLQ, sektor unggulan Jawa Tengah antara lain sektor konstruksi (LQ: 1,17 dan DLQ: 3,62), perdagangan (LQ: 1,04 dan DLQ: 1,30), penyediaan akomodasi makan dan minum (LQ: 1,11 dan DLQ: 10,00), dan jasa pendidikan (LQ: 1,49 dan DLQ: 8,85). Sedangkan dari sisi hasil IBL dan IFL, dari keempat sektor basis unggulan tersebut, hanya sektor perdagangan yang memiliki keterkaitan antar sektor yang kuat. Ditambah dengan sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik dan gas. Maka dari itu, penyesuaian fungsi perlu dilakukan dengan berfokus pada pengoptimalan sektor-sektor yang menjadi unggulan dan benar-benar menunjukkan kinerjanya pada perekonomian.

Selanjutnya adalah kawasan Gerbangkertosusila di Provinsi Jawa Timur yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, dan pusat pelayanan transportasi antar provinsi. Sesuai dengan fungsi yang ditetapkan pemerintah untuk PKU tersebut, maka fungsi sebagai pusat komoditas unggulan yang berbasis pada potensi lokal dapat disesuaikan dengan sektor-sektor unggulan sesuai hasil perhitungan LQ, DLQ, IBL, dan IFL, di mana, sektor industri pengolahan dan perdagangan besar menjadi sektor basis yang memiliki potensi di masa depan. Sedangkan dari sisi IBL dan IFL, sektor perdagangan juga memiliki keterkaitan antar sektor yang kuat, bersamaan dengan sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor jasa informasi dan komunikasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah masih bersifat *general* dan belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik sektoral dari masing-masing wilayah. Maka dari itu, kajian mendalam dengan memperhatikan hasil analisis sektoral serta potensi masing-masing wilayah perlu dilakukan agar fungsi yang ditetapkan untuk setiap PKU sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dan kebijakan dapat berjalan dengan efektif, sehingga kontribusi PKU dapat benar-benar dirasakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Kemudian, untuk kabupaten/kota lain dari masing-masing provinsi di atas dan kabupaten/kota yang ada di provinsi DIY yang tidak terpilih menjadi PKU, oleh

pemerintah wilayah-wilayah tersebut ditetapkan sebagai PKP atau Pusat Kegiatan Pendukung yang berfungsi sebagai pendukung pusat pengembangan wilayah. Pembagian PKP sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2023 antara lain Kawasan Perkotaan Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Rangkasbitung di Banten, Kawasan Perkotaan Pelabuhan Ratu, Indramayu, Sukabumi, Cidaun, Perkotaan Kadipaten, Cirebon, Tasikmalaya, dan Pangandaran di Jawa Barat, Kawasan Perkotaan Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Surakarta, Kudus, dan Cepu di Jawa Tengah, Kawasan Perkotaan Sleman, Yogyakarta, Bantul di DIY, dan Kawasan Perkotaan Pacitan, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Pamekasan di Jawa Timur.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui kabupaten/kota yang terpilih sebagai PKP. Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang menjadi PKP diantaranya adalah pertama Kota Cilegon. Perekonomian yang mendominasi di kota ini adalah sektor industri pengolahan dengan nilai PDRB mencapai 77 triliun rupiah pada tahun 2024 (BPS Kota Cilegon, 2025). Dengan basis industri baja, petrokimia, dan kimia, Kota Cilegon menjadi PKP dengan yang berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi di Banten dan Jabodetabek yang menjadi PKU dengan menyediakan barang industri berat dan perdagangan grosir. Kedua adalah Serang, di mana kota ini merupakan ibu kota Banten yang memiliki jenis perekonomian beragam dengan potensi sebagai pusat administrasi dan distribusi bagi provinsi Banten. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Serang mendukung PKU melalui fungsi administratif dan komersialnya di tingkat provinsi. Kemudian Kabupaten Pandeglang dan Rangkasbitung, yang keduanya memiliki karakteristik ekonomi yang mirip yaitu ekonominya didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu ditambah juga dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten tersebut, sehingga kabupaten Pandeglang dan Rangkasbitung berperan dalam mendukung PKU melalui penyediaan sumber pasokan pangan dan dukungan ekowisata.

Kemudian beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dengan potensi ekonominya masing-masing yang ditetapkan sebagai PKP antara lain, pertama adalah Pelabuhan Ratu dengan perekonomian yang bergerak pada bidang pariwisata bahari dan perikanan. Pelabuhan Ratu sebagai PKP, mendukung PKU melalui pengembangan potensi wisata dan penyediaan produk kelautan sesuai potensi yang dimilikinya. Kedua adalah Kabupaten Indramayu, dengan potensinya di sektor pertanian dan industri pengolahan minyak dan gas, sebagai PKP memiliki peran penting dalam mendukung PKU sesuai sektor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Banten yaitu sektor pengadaan listrik dan gas. Kemudian ada Kabupaten/Kota Sukabumi yang termasuk juga Pelabuhan Ratu, dan Cidaun di Kabupaten Cianjur, dengan karakteristik perekonomian yang mirip, yaitu didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan pariwisata, mendukung PKU melalui potensi pariwisata yang dimilikinya dan sebagai penghubung logistik antar daerah-daerah di sekitarnya. Selanjutnya adalah

Kabupaten Tasikmalaya dengan potensi ekonomi ada pada sektor perdagangan dan jasa, juga industri garmen, mendukung PKU melalui penyediaan produk tekstil. Lalu Kota Cirebon dengan perekonomian yang bergerak pada sektor industri manufaktur, perikanan, dan perdagangan. Selain itu, kota Cirebon juga berperan sebagai pusat pelabuhan laut dan memiliki stasiun besar yang melayani distribusi di Jawa Barat. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, kota Cirebon mendukung PKU Bandung dan Jabodetabek melalui perdagangan grosir dan manufaktur. Dan terakhir adalah Kabupaten Pandeglang dengan ekonomi yang berbasis pariwisata bahari dan perikanan, mendukung PKU dengan berperan menyediakan destinasi wisata strategis dan penghasil komoditas kelapa dan perikanan.

Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi PKP antara lain Purwokerto di Kabupaten Banyumas. Dengan perekonomian yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, agroindustri, dan pariwisata, Purwokerto menjadi PKP bagi PKU Jawa tengah dengan menyangga pariwisata regional. Selanjutnya kota Tegal dengan perekonomian yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang paling besar yaitu mencapai 25,22% dari total PDRB kota Tegal tahun 2023. Selain itu, kota Tegal juga memiliki potensi pada pengembangan pelabuhan yang dimilikinya sebagai jalur distribusi produk dari dan ke Jawa Tengah. Sehingga kota Tegal berperan mendukung PKU melalui potensi yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya adalah kota Pekalongan dengan perekonomian yang bergerak pada sektor industri batik dan tekstil serta perdagangan. Di mana, berdasarkan data BPS, sektor manufaktur tekstil menjadi kontributor terbesar dalam PDRB. Kemudian Kabupaten Kebumen, dengan potensi sumber daya tambang yang melimpah dan adanya industri semen, juga potensi di sektor pertanian, mendukung PKU melalui pasokan semen dan komoditas agraris yang dihasilkannya. Selanjutnya adalah kabupaten Wonosobo dengan perekonomian yang berbasis agraria dan pariwisata alam, sehingga Wonosobo mendukung PKU melalui pasokan hasil perkebunan dan pengembangan pariwisata alam. Selanjutnya Kabupaten Magelang, memiliki struktur perekonomian yang didominasi oleh lima sektor yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Jasa Pendidikan. Kemudian kabupaten Boyolali, memiliki industri pengolahan sebagai kontributor terbesar pada PDRB, bersamaan dengan sektor pertanian, dan sektor perdagangan. Selain itu, Boyolali juga memiliki potensi besar pada sektor peternakan dan industri pengolahan susu. Selanjutnya adalah kabupaten Klaten dengan sektor basis yang terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya (YudiUtama, 2017). Selanjutnya adalah Kota Surakarta dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor konstruksi yang berkontribusi sebesar 25,13% dari total PDRB Surakarta Tahun 2023 dan sektor perdagangan besar dan eceran (BPS Kota Surakarta, 2024). Selanjutnya adalah kabupaten Kudus yang memiliki basis ekonomi pada industri pengolahan, utamanya adalah industri pengolahan tembakau

atau produk rokok, dan industri perdagangan. Dengan kekuatan di kedua sektor tersebut, kabupaten Kudus memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi regional. Terakhir adalah kabupaten Blora dengan sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi penyumbang terbesar yaitu mencapai 23,47% dari total PDRB. Melalui potensi tersebut, Blora menjadi PKP yang mendukung PKU dan mendorong perekonomian yang sesuai dengan salah satu sektor unggulan yang dimiliki Jawa Tengah.

Selanjutnya adalah Provinsi DIY dengan kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul yang ditetapkan sebagai PKP. Di mana kabupaten/kota tersebut memiliki struktur ekonominya masing-masing, seperti Sleman yang memiliki Industri Pengolahan, Konstruksi dan Informasi Komunikasi sebagai tiga sektor dengan kontribusi paling besar pada PDRB, yaitu dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,44 persen, 11,29 persen dan 10,28 persen. Kemudian kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi DIY, memiliki sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan sektor informasi dan komunikasi sebagai sektor dengan kontribusi paling besar pada PDRB yaitu dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,02%, 13,44%, dan 12,39%. Dan kabupaten Bantul yang kegiatan ekonomi utamanya didominasi oleh sektor pertanian, pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif sebagai penghasil kerajinan. Di mana, sektor ekonomi kreatif tersebut didominasi oleh pelaku industri kecil yang pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 24.942 unit usaha, penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 104.363 orang, total nilai produksi sebesar Rp. 269.766.000,00 (DPMPTSP Kab. Bantul, 2022). Melalui pemanfaatan potensi dari masing-masing wilayah tersebut, PKP memiliki peran penting dalam mendukung PKU dan mendorong pengembangan wilayah di sekitarnya.

Selanjutnya adalah kabupaten/kota di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai PKP, diantaranya adalah Kawasan Perkotaan Pacitan, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Pamekasan. Kabupaten/kota tersebut memiliki potensi ekonominya masing-masing, namun sebagian besar didominasi oleh pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Kemiripan struktur ekonomi tersebut disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Dengan potensi-potensi tersebut, wilayah PKP di Jawa Timur memiliki peran penting dalam memasok bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang konsumsi untuk kawasan PKU, sehingga akan mendorong integrasi rantai pasokan dan memperkuat hubungan fungsional kawasan antara daerah pusat dan daerah penyangga.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis LQ, DLQ, IBL, dan IFL dalam menetapkan dan memetakan sektor unggulan. Di mana, dengan menggunakan alat analisis tersebut akan memberikan hasil yang relevan dalam menunjukkan sektor yang menjadi basis ekonomi dan prospektif di masa mendatang menggunakan LQ dan LQ dinamis, serta keterkaitan antar sektor berdasarkan nilai IBL dan IFL. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sektor jasa pendidikan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan industri pengolahan menjadi sektor yang secara umum menjadi unggulan di sebagian provinsi di Pulau Jawa berdasarkan analisis LQ dan DLQ yang menunjukkan posisi sektor-sektor tersebut sebagai basis ekonomi dan memiliki potensi pertumbuhan yang kompetitif. Namun, hanya sebagian sektor yang memiliki keterkaitan antar sektor yang kuat. Berdasarkan hasil analisis IBL dan IFL, menunjukkan bahwa hanya sektor perdagangan besar dan eceran di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sektor jasa informasi dan komunikasi di provinsi DIY, yang secara konsisten menjadi basis ekonomi sekaligus menjadi unggulan karena memiliki keterkaitan antar sektor yang kuat. Selain itu, sektor pengadaan listrik dan gas juga menjadi unggulan dengan keterkaitan antar sektor yang kuat di seluruh provinsi di Pulau Jawa kecuali di DIY.

Kemudian, meskipun dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2023 telah ditetapkan beberapa kelompok wilayah perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Utama (PKU) dengan fungsinya masing-masing. Namun, fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap PKU tersebut belum sesuai dengan karakteristik setiap provinsi dan masih bersifat *general*. Selanjutnya untuk wilayah yang ditetapkan sebagai PKP, memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan PKU melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah secara optimal, sehingga akan mendorong integrasi dan penguatan hubungan fungsional kawasan antara daerah pusat dan daerah penyangga. Oleh karena, melalui penelitian ini yang berupaya menghasilkan pemetaan sektor unggulan yang dimiliki oleh setiap provinsi di Pulau Jawa, diharapkan akan memberikan gambaran awal yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, beberapa saran disampaikan sebagai masukan yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Pertama, pemerintah perlu melakukan kajian dan penyesuaian ulang dalam menetapkan fungsi dari setiap kawasan perkotaan yang menjadi PKU sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan dengan efektif dan wilayah-wilayah PKU dapat berkembang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah sehingga PKP dapat mengoptimalkan

fungsinya dalam mendukung PKU. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah perlu mengintegrasikan sektor-sektor unggulan yang telah dipetakan ke dalam perencanaan strategis daerah. Di mana, melalui pendekatan tersebut akan memanfaatkan kekuatan sektor unggulan untuk membuka peluang baru dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya melalui keterkaitan antar sektor. Keempat, penguatan kelembagaan melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah dengan memastikan sektor unggulan mendapatkan dukungan yang terpadu dan keterkaitan antar sektor dapat dioptimalkan. Kelima, pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan sektor jasa pendidikan sebagai sektor unggulan sehingga kualitas SDM dan tenaga kerja yang berkualitas akan meningkat, yang mana akan aspek tersebut memiliki peran penting dalam mendukung daya saing sektor unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, L. (2018). Lq , Mrp and Klassen Analysis To Determine Leading and Potential Sectors in Semarang City. *Statistics Indonesia*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36817.79203>
- Anisah, L., & Hersugondo, H. (2018). Mengungkap Potensi Perdagangan, Industri dan Akomodasi Jawa Tengah Untuk Perekonomian Berkualitas. *Seminar Nasional BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 2018*, 421–428.
- Arum, N. S., & Aminda, R. S. (2023). Analisis Sektor Unggulan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2015-2019. *Jurnal Of Development Economic And Digitalization*, 2(2), 21–32.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Ekonomi Indonesia Triwulan II-2024 Tumbuh 3,79 Persen (Q-to-Q), Ekonomi Indonesia Triwulan II-2024 Tumbuh 5,05 Persen (Y-on-Y), dan Ekonomi Indonesia Semester I-2024 Tumbuh 5,08 Persen (C-to-C)*.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/2381/>
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)*. <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAzIzI=/harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024c). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzMjMg==/indeks-pembangunan-manusia---ipm--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024d). *Jumlah Bank dan Kantor Bank Menurut Jenis Bank*. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUzIzI=/jumlah-bank-dan-kantor-bank-menurut-jenis-bank.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024e). *Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di*

Provinsi Banten (Tahun). <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzYjMg==/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsibanten.html>

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi DKI Jakarta*. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0UxS09GQlBTbk5QWTBNdlVWUmXSMjV3Y3l0VWR6MDkjMw==/distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-di-provinsi-dki-jakarta--2017.html>

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Posyandu, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024*. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/YmlzemNGUkNVblZLVVhObIREWnZXbkEzWld0eVVUMDkjMw==/jumlah-rumah-sakit-umum--rumah-sakit-khusus--puskesmas--klinik-pratama--dan-posyandu-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta--2022.html?year=2024>

Badan Pusat Statistik. (2025c). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (persen)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtce1ibkF5VjFSeIjHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2024>

Badan Pusat Statistik. (2025d). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV-2024*. <https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/1198/jakartas-economic-growth-in-the-fourth-quarter-of-2024.html>

Badan Pusat Statistik. (2025e). *Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YWtoQlRVZzNiMU5qU1VOSIRFeFZiRTR4VDJOTVVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--ribu-rupiah---2022.html?year=2022>

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2024a). *Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2023-2024*. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg3IzI=/-komponen-ipg-harapan-lama-sekolah.html>

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2024b). *Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat 2023/2024*. <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2024/12/27/a628cda5f74bcca8141f349c/statistik-air-bersih-provinsi-jawa-barat-2023-2024.html>

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2025). *[Seri 2010] Distribusi PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010 - 2024*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTY5MCMx/-seri-2010--distribusi-pdrb-jawa-tengah-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha--persen---2010---2024.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2024). *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur 2023 Volume 20, 2024*. <https://jatim.bps.go.id/id/publication/2024/05/20/6eb90223196876c46c1642f7/laporan-eksekutif-keadaan-angkatan-kerja-provinsi-jawa-timur-2023-volume-20-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2025). *Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Jawa Timur, 2024*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0UxS09GQlBTbk5QWTBNdlVWUmXSMjV3Y3l0VWR6MDkjMw==/distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-di-provinsi-jawa-timur--2017.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2025). *Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi DI Yogyakarta, 2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0UxS09GQlBTbk5QWTBNdlVWUmXSMjV3Y3l0VWR6MDkjMw==/distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023>
- Bangun, D. S., & Setyono, J. S. (2020). Tipologi Wilayah Jawa Bagian Tengah Berdasarkan Sektor Konstruksi Central Java Region Typology Based on the Construction Sector. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 16(4), 314–323. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index>
- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Distribusi Persentase PDRB Bojonegoro ADHK (Persen), 2022*.
- BPS Kabupaten Tuban. (2025). *Distribusi PDRB Kabupaten Tuban Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2022-2024*. <https://tubankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMyIzI=/distribusi-pdrb-kabupaten-tuban-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>
- BPS Kota Cilegon. (2025). *PDRB Kota Cilegon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), 2022-2024*. <https://cilegonkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/pdrb-kota-cilegon-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>
- BPS Kota Surakarta. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2023*.

- Dewi, O. N. (2014). *Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Pulau Jawa Tahun 2008-2012*. Universitas Sebelas Maret.
- DPMPTSP Kab. Bantul. (2022). *SEKTOR EKONOMI KREATIF*. https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/24-sektor-perindustrian-dan-ekonomi-kreatif
- Fikri, M. T., & Fafurida, F. (2018). Sektor Unggulan dan Keterkaitan Spasial Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3), 243–250. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25256>
- Hazari, B. R. (1970). Empirical Identification of Key Sectors. *The Review of Economics and Statistics*, 52(3), 301–305.
- Junari, T., Rustiadi, E., & Mulatsih, S. (2020). Identifikasi Sektor Industri Pengolahan Unggulan Propinsi Jawa Timur (Analisis Input Output). *Tataloka*, 22(3), 308–320. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.3.308-320>
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta. (2018). *Kajian Fiskal Regional DKI Jakarta Tahun 2018*.
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?* Salemba Empat.
- Octaviany, R. A. (2018). *Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Wilayah Pantai Utara Pulau Jawa*. Universitas Airlangga.
- Pemkab Bojonegoro. (2020). *Enam Pilar Pembangunan Berkelanjutan Bojonegoro*. <https://baghumas.bojonegorokab.go.id/berita/baca/17>
- Permana, S. C., Solihin, Marsudijono, Putri, M. K., Rizal, S., & Juliansyah, F. A. H. (2023). *Direktori Industri Manufaktur Jawa Barat 2023*.
- Raa, T. ten. (2020). Linkages, fields of influence and key sectors. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 9–11. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00210-8>
- Rasmussen, P. N. (1956). *Studies in Inter-sectoral Relations*. North-Holland.
- Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Perpres Nomor 72 Tahun 2023), 1 (2023).
- Sumarna, E., & Hidayatullah, M. S. (2023). Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Provinsi Banten 2022/2023. In *BPS Provinsi Banten* (Vol. 22).
- Sutanti. (2020). *Analisis Sektor Unggulan Provinsi Banten Dengan Metode Location Quotient Dan Shift Share*.
- Wardana, A. K., & Muta'ali, L. (2025). Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan*, 9(1), 33–61.
- Yotopoulos, P. A., & Nugent, J. B. (1973). A Balanced-Growth Version of The Linkage

Hypothesis: A Test. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(2), 157–171.
<https://doi.org/10.1093/ITNOW/BWAA110>

YudiUtama, A. W. (2017). *Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Klaten*.